



**RILIS KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
PADA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2024-2025
KE KABUPATEN FAKFAK PROV PAPUA BARAT
TANGGAL 06 – 10 DESEMBER 2024**

=====

Dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan pengawasan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Fakfak pada tanggal 06 – 10 Desember 2024. Kunjungan tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI; pejabat Kementerian PU, Pejabat Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG dan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Beberapa objek utama yang dikunjungi yakni peninjauan rencana pembangunan akses jalan bandara sepanjang 26,15 km Siboru dan rencana pengembangan bandara Siboru pada sisi udara serta pertemuan untuk mendapatkan masukan dan saran atas pembangunan infrastruktur dan transportasi di kabupaten Fakfak “Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan agar Komisi V DPR RI dapat melihat dan mendengarkan secara langsung upaya-upaya yang dilakukan terhadap pemanfaatan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang dibiayai APBN serta memastikan semua pembangunan itu bermanfaat untuk masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat”, kata Ridwan Bae, Ketua Tim.

Sampai saat ini bandara Siboru Fakfak memiliki runway atau landasan pacu dengan panjang 1600 meter dan lebar 30 meter dengan panjang dan lebar runway tersebut hanya mampu melayani penerbangan dengan jenis pesawat ATR-72 dan belum mampu melayani penerbangan dengan pesawat yang berukuran besar. Oleh karena itu masih dibutuhkan penambahan panjang dan lebar pada runway bandara menjadi 2100 meter dengan kebutuhan anggaran diperkirakan Rp 500 Miliar. Selanjutnya, yang menjadi perhatian serius saat ini yaitu kondisi geografis di sekitar runway bandara Siboru yang **sangat membahayakan keselamatan penerbangan** seperti terdapat bukit dan galian disekitar area bandara.

Terkait rencana pembangunan jalan menuju bandara Siboru sepanjang 26,15 km dengan target anggaran sebesar Rp 361 M. Kementerian PU telah mengalokasikan di tahun 2023 sebesar Rp 150 M dan tahun 2024 Rp 90 M namun anggaran tersebut di kembalikan lagi ke Negara. Sementara tahun 2025 belum di anggarkan lagi karena permasalahan lahan yang belum di sediakan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan urgensi pembangunan jalan tersebut komisi V DPR RI **meminta Pemerintah Daerah Fakfak untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan** sehingga pembangunan jalan dapat terlaksana untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh guna meningkatkan ekonomi masyarakat.

Sementara dalam pertemuan bersama Komisi V DPR RI, Pemerintah Daerah menjelaskan kendala medasar yang dialami selama ini sehingga menjadi faktor penghambat belum dilaksanakan pembangunan jalan. Pembebasan lahan masyarakat yang menjadi hak ulayat akan dibebaskan dengan pembiayaan oleh APBD yang diperkirakan sebesar **Rp 10,2 M** yang terdiri dari pembebasan lahan dan pembebasan atas tanaman umur panjang. Terkait pembebasan terhadap tanaman umur panjang yang di rasakan masyarakat nilainya terlalu kecil berdasarkan Perda, Pemerintah daerah kabupaten akan meninjau kembali Perda tersebut untuk mempermudah proses pembebasan lahan.

Selanjutnya Pemerintah daerah oleh Wakil Bupati Fakfak berkomitmen akan menindaklanjuti proses pembebasan lahan secepatnya dan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta stakeholder terkait.

Tim Kunker Reses Fakfak Provinsi Papua Barat